

**STRUKTUR PENDAPATAN DAN POLA PENGELUARAN PADA
RUMAHTANGGA MISKIN DI DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN
RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

STRUCTURE OF INCOME AND EXPENDITURE PATTERNS IN RURAL
POOR IN HOUSEHOLD KAMPUNG PULAU DISTRICT RENGAT
INDRAGIRI HULU REGENCY

Yonatan Pangidoan Lubis¹, Syaiful Hadi² dan Yusmini³

ABSTRACT

Research on the Structure of Income and Expenditure Patterns in poor households in the village of Kampung Pulau District Rengat Indragiri Hulu regency background to see the condition of the household and other expenses continue to rise so that the increase of expenditure. The research was conducted in the village of Kampung Pulau District Rengat Indragiri Hulu regency .Consideration of site selection is based on the highest number of poor households in the District Rengat, and the diversity of family livelihoods. The purpose of this study were to: 1) Analyze the structure of household income poor 2) Analyzing the spending patterns of poor households 3) Analyze the depth of poverty 4) Analyze the severity of poverty .Average per capita income of poor families in the village of Kampung Pulau still far from the poverty line. Pattern of poor spending was allocated for food .Index of the depth of poverty in the village of Kampung island of 0.33 with an indication of the average expenditure of the poor getting closer to the poverty line and poverty severity index in the village of Kampung Pulau much as 0.12 with an indication of the average expenditure inequality among the poor there are low and getting closer to equity .

Key words : Structure of Income , Spending Patterns , Depth of Poverty , Poverty Severity

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, padahal sebelum terjadinya krisis tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang. Sebelum krisis ekonomi ditahun 1996 jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta jiwa. Akibat krisis ekonomi yang berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2003).

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2010 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk

¹ Mahasiswa Jurusan Agribisnis Universitas Riau (yonatan_agb08@yahoo.com)

² Dosen Jurusan Agribisnis Universitas Riau

³ Dosen Jurusan Agribisnis Universitas Riau

menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Pemerintah Indonesia dalam upayanya mengentaskan kemiskinan melakukan beberapa langkah, diantaranya program Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 32,5 juta jiwa atau 14,15%, sekitar 20,6 juta jiwa tinggal di pedesaan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 31,02 juta jiwa atau 13,33 % dan diantaranya 19,9 juta jiwa tinggal di pedesaan (BPS, 2011).

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat mencapai 527,5 ribu jiwa atau 9,48 %, sekitar 301,9 ribu jiwa tinggal di pedesaan. Sedangkan pada tahun berikutnya pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Riau mengalami penurunan menjadi 500,3 ribu jiwa atau 8,34 %, sekitar 291,3 ribu jiwa tinggal di pedesaan (BPS Provinsi Riau, 2011).

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2009 tercatat mencapai 35,98 ribu jiwa atau 10,25 % dari jumlah penduduk dan di tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 32,4 ribu jiwa atau 8,9 % dari jumlah penduduk. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan namun bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu masih memiliki banyak masyarakat yang berpendapatan rendah (miskin), sehingga perlu langkah-langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran yang mendukung rakyat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan (BPS Indragiri Hulu, 2011).

Berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2011, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan, tetapi bila kita lihat penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan setiap tahunnya tidak secepat penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan bahkan semakin bertambah banyak. Banyaknya penduduk miskin merupakan cerminan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi ketidakmerataan kesempatan kerja yang produktif. Desa Kampung Pulau merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kecamatan Rengat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dapat melihat struktur pendapatan dan pola pengeluaran pada rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur pendapatan rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Bagaimana pola pengeluaran rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?
3. Seberapa dalam tingkat kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ?

KAJIAN PUSTAKA

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah, kemiskinan mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Definisi kemiskinan dapat diterangkan ke dalam beberapa terminologi seperti, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya kemiskinan relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan. Dalam menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan (Katalog BPS, 2007).

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut ini berguna dalam menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek kemiskinan (Katalog BPS, 2007).

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan, yang dimaksud tidak menguntungkan disini adalah karena tatanan sosial yang tidak adil sehingga melanggengkan kemiskinan. Tatanan kehidupan ini yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai peluang dan atau akses untuk mengembangkan dirinya (Katalog BPS, 2007).

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ini sebenarnya bisa dikurangi dan dihilangkan secara bertahap dengan mengabaikan adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan kearah tingkat kehidupan yang lebih baik (Katalog BPS, 2007).

Pada umumnya rumahtangga penduduk yang memiliki pendapatan rendah diikuti dengan pengeluaran yang rendah pula, sehingga sebagian besar dialokasikan pada kebutuhan makan (pangan), yang menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menjadi miskin dapat disebabkan berbagai faktor. Ada empat faktor penyebab kemiskinan: pertama, sumberdaya alam (pemilikan lahan), kedua, keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi dan unsur pendukungnya, ketiga, sumberdaya manusia yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan produktivitas kerja, dan keempat, prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan (Dillon, 1999).

Sayogyo (1990) membuat klasifikasi tingkat kemiskinan berdasarkan besarnya pengeluaran perkapita per tahun yang diukur dengan nilai setara beras setempat. Untuk daerah pedesaan kriterianya sebagai berikut: a) paling miskin (melarat), apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 180 Kg beras, b) miskin sekali, apabila pengeluaran per kapita per tahun senilai 180 Kg sampai 240 Kg beras, c) miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun senilai 240 Kg sampai 320 Kg beras, d) nyaris miskin, apabila pengeluaran per

kapita per tahun senilai 320 Kg sampai dengan 480 Kg beras, dan e) tidak miskin, apabila pengeluaran per kapita per tahun besar dari 480 Kg setara beras.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dampak krisis ekonomi juga tercermin pada meningkatnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan baik di desa maupun di kota. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Indeks* (P1), merupakan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahannya Kemiskinan/*Poverty Severity Indeks* (P2), merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (BPS, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang jaraknya \pm 159 Km dari Ibukota Provinsi Riau. Penempatan daerah ini sebagai tempat penelitian karena Desa Kampung Pulau salah satu desa terbanyak memiliki masyarakat miskin sampai 235 rumah tangga atau 34,61% dari 2860 jiwa jumlah penduduk di Desa Kampung Pulau di tahun 2007. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 11 Bulan dari Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Nopember 2012, dengan tahapan

penyusunan proposal selama dua bulan, pengumpulan data selama satu bulan sampai laporan hasil penelitian selama delapan bulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Cluster Proportional Random Sampling* dimana setelah diketahui kelompok rumahtangga miskin, selanjutnya sampel dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan utamanya yaitu pekerjaan sebagai petani, pedagang, industri dan jasa, selanjutnya diambil sampel dengan menggunakan metode *Proportional Random Sampling* dari jenis pekerjaan utama tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dimana jumlah keseluruhan populasi rumahtangga miskin adalah 235 RT dari 990 jiwa masyarakat miskin di Desa Kampung Pulau. Sampel yang akan diteliti meliputi 4 sektor yaitu : pertanian, perdagangan, industri dan jasa.

Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 33 rumahtangga (RT) yang bermukim di Desa Kampung Pulau. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa karakter masyarakat yang beragam, serta informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui wawancara dan kuesioner secara mendalam.

Struktur pendapatan rumahtangga dapat dihitung dengan penjumlahan bagian-bagian dari total pendapatan rumahtangga miskin, yaitu pendapatan pokok dan pendapatan sampingan rumahtangga, terlebih dahulu menghitung pendapatan dari berbagai sektor pekerjaan yang ada.

a. Sektor pertanian

Cara menghitung pendapatan petani umumnya ialah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual dikurangi dengan semua biaya usaha tani yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Contoh biaya-biaya yang terkait bisa biaya pembelian sarana produksi, penyusutan mesin dan peralatan. Adapun perhitungan pendapatan bersih sektor pertanian adalah: (Soekartawi, 1992).

$$\Pi_{UT} = TR - TC$$

$$\Pi_{UT} = (P_y \times Q_i) - (FC + VC)$$

dimana :

Π_{UT} : Keuntungan Usaha Tani

TR : Total Pendapatan

P : Harga Jual Produksi y (sayur atau ikan)

Q : Produksi yang diperoleh dalam usaha i (ikan atau sayur)

FC : Biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contoh biaya tetap antara lain : penyusutan peralatan pertanian, penyusutan sampan dan sebagainya.

VC : Biaya tidak tetap biasanya didefinisikan sebagai biaya besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Contoh biaya untuk sarana produksi (pupuk, pestisida, benih dan lain-lain).

b. Sektor Perdagangan

Cara menghitung pendapatan bersih pedagang bisa dilihat dari jenis usaha yang dijual, modal, keuntungan dan pengeluarannya. Pendapatan bisa diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya. Contoh biaya-biaya

yang terkait bisa berupa biaya pembelian produk yang diperdagangkan, dan sebagainya (Anonim, 2012):

$$\text{Pendapatan Bersih Pedagang} = \text{Penerimaan} - \text{Pengeluaran (Biaya-biaya)}$$

c. Sektor Jasa

Sektor jasa bisa dilihat dari pendapatannya. Bisa juga dilihat dari jumlah hari kerja dikalikan upah per hari, untuk sektor jasa yang menggunakan kendaraan dalam memperoleh pendapatan maka kendaraan yang digunakan tersebut tetap dihitung sebagai biaya penyusutan (Anonim, 2012).

d. Sektor Industri

Cara menghitung pendapatan sektor industri bisa dilihat dari jenis usaha penerimaan total, keuntungan dan pengeluarannya. Pendapatan bisa diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya. Contoh biaya-biaya yang terkait bisa berupa biaya pembelian peralatan industri, pembelian bahan baku industri, penyusutan peralatan industri dan sebagainya (Anonim, 2012):

$$\text{Pendapatan Industri} = \text{Penerimaan} - \text{Pengeluaran (Biaya-biaya)}$$

Selanjutnya untuk menganalisis tingkat pendapatan, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis tingkat pendapatan rumahtangga, digunakan rumus (Widodo, 1990):

$$Y_{rt} = (Y_{i1} + Y_{i2}) \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- Y_{rt} = Pendapatan rumahtangga (Rp/bulan)
- Y_{i1} = pendapatan dari mata pencaharian pokok (Rp/ bulan)
- Y_{i2} = Pendapatan dari usaha sampingan (Rp/ bulan)

Analisis pada pengeluaran dan konsumsi rumahtangga dilakukan secara deskriptif, melalui tabel-tabel analisis, analisis untuk pengeluaran dan konsumsi rumahtangga dianalisis dalam satu bulan. Data lapangan yang telah didapat untuk pengeluaran pangan adalah selama satu minggu data tersebut dibagi selama 7 hari dan dikalikan dengan 30 atau satu bulan (Endang, 2009).

Selanjutnya untuk menjawab tujuan ketiga dan keempat yaitu mengenai analisis tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P₁) dan analisis tingkat keparahan kemiskinan (*Poverty Saverity Index* – P₂) dapat dianalisis dengan menggunakan rumus *Foster Greer Thorbecke - FGT Index* (Katalog BPS, 2008):

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

- α = 0, 1, 2
- z = Garis Kemiskinan (GK)
- y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z
- q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0)

$\alpha=1$, diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P_1)

$\alpha=2$, disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty severity Index* - P_2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin di Desa Kampung Pulau, pendapatan perkapita yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota rumahtangga dibagi dengan seluruh anggota rumahtangga masyarakat. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang benar-benar dapat diterima (pendapatan riil) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Besarnya pendapatan perkapita masyarakat miskin Desa Kampung Pulau yang dihitung berdasarkan pendapatan riil masyarakat. Besarnya pendapatan perkapita rata-rata rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau yaitu sebesar Rp 186.863,- perbulan. Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat miskin di Desa Kampung Pulau masih berada jauh dari garis kemiskinan pedesaan di Provinsi Riau Tahun 2011 yaitu sebesar Rp 280.271,- untuk itu perlu dilakukannya upaya dalam peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Struktur Pendapatan Rumahtangga Responden Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan Per Bulan (Rp)	Persentase (%)	Rata-rata Pendapatan/RT/ Bulan	Persentase (%)
A	Utama				
1	Pertanian	12.620.151	40,68	841.343	22,48
2	Perdagangan	1.723.167	5,56	861.584	23,02
3	Industri	1.716.639	5,53	858.320	22,93
4	Jasa	12.117.595	39,06	865.543	23,13
	Sub Total	28.177.552	90,84	3.426.789	91,56
B	Sampingan				
1	Pertanian	0	0,00	0	0,00
2	Perdagangan	0	0,00	0	0,00
3	Industri	0	0,00	0	0,00
4	Jasa	2.841.666	9,16	315.741	8,44
	Sub Total	2.841.666	9,16	315.741	8,44
	Total	31.019.218	100,00	3.742.530	100,00
	Rata-rata/RT	Rp 939.976,-			
	Pendapatan Perkapita Perbulan	Rp 186.863,-			

Sumber : Data Primer, diolah

Pengeluaran pangan adalah pengalokasian pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan pola pengeluaran non pangan adalah pengeluaran yang pengalokasiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang dan jasa non makanan. Pola pengeluaran rumahtangga menggambarkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2008).

Persentase Rata-rata Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Responden Rumah tangga Miskin

No	Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Responden		%
		Total (Rp)	Rata-rataan (Rp)	
A. Pangan				
1	Padi-padian	7.612.600	230.685	35,79
2	Umbi-umbian	802.000	24.303	3,77
3	Daging	1.382.500	41.894	6,50
4	Ikan	1.903.000	57.667	8,95
5	Telur dan Susu	1.339.600	40.594	6,30
6	Minyak dan lemak	1.527.200	46.279	7,18
7	Kacang - Kacangan	831.800	25.206	3,91
8	Gula dan Bahan Minuman	1.261.100	38.215	5,93
9	Sayur-sayuran	649.500	19.682	3,05
10	Buah-Buahan	486.000	14.727	2,29
11	Bumbu-bumbuan	653.600	19.806	3,07
12	Tembakau dan Sirih	2.342.500	70.985	11,01
13	Konsumsi Lainnya	476.000	14.424	2,24
Jumlah		21.267.400	644.467	100
Persentase			68,71	
B. Non Pangan				
1	Uang sekolah, perumahan, bahan bakar, penerangan dan air	4.240.300	128.494	43,79
2	Barang dan jasa	1.130.200	34.248	11,67
3	Pakaian alas kaki dan tutup kepala	691.800	20.964	7,14
4	Kesehatan dan rekreasi	709.100	21.488	7,32
5	Pajak dan Asuransi	500.200	15.158	5,17
6	Keperluan Pesta, Sosial dan Upacara	1.237.500	37.500	12,78
7	Pengeluaran Lainnya	1.174.800	35.600	12,13
Jumlah			293.452	100
Persentase			31,29	
Total		21.267.400	937.918	

Sumber : Data Primer, diolah

Tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) menggambarkan ukuran rata-rata pendapatan yang didekati dengan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dengan kata lain sedalam mana kemiskinan masing-masing penduduk miskin dari batas atau garis kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan penduduk Desa Kampung Pulau yang dianalisis dengan analisis *Poverty Gap Index* (PGI) adalah 0,33. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan penduduk miskin di Desa Kampung Pulau berada 33 % dibawah garis kemiskinan, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga miskin besar dari 33 % atau penambahan rata-rata pendapatan

sekitar Rp 130.191,- per kapita, agar masyarakat dapat berada diatas garis kemiskinan (*poverty line*).

Peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan memberi dampak positif yakni berkurangnya angka kemiskinan yang akan diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan disuatu wilayah. Peningkatan pendapatan penduduk miskin dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program baik kegiatan langsung melibatkan penduduk maupun kegiatan tidak langsung diantaranya memperluas atau membuka kesempatan kerja yang ditujukan kepada penduduk miskin. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat.

Untuk meningkatkan kemampuan dasar masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan mendampingi masyarakat miskin dalam melakukan dan mengembangkan usahanya. Program ini juga membutuhkan peranan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, informasi pasar, dan lembaga penyedia sarana dan prasarana produksi serta lembaga yang membantu memasarkan hasil-hasil usaha masyarakat.

Tingkat keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) menggambarkan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu daerah.

Keparahan kemiskinan penduduk Desa Kampung Pulau yang dianalisis dengan *Poverty Severity Index* adalah 0,12. Hal ini mengindikasikan pengeluaran diantara penduduk miskin di Desa Kampung Pulau cenderung merata, atau dengan kata lain rendahnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Desa Kampung Pulau. Sehingga penduduk miskin di Desa Kampung pulau akan lebih mudah keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

KESIMPULAN

1. Rata-rata pendapatan rumah tangga miskin di Desa Kampung Pulau sebesar Rp 939.976,- /bulan dengan pendapatan perkapita keluarga miskin

di Desa Kampung Pulau yang masih berada jauh dibawah garis kemiskinan, dimana jumlah tanggungan terbanyak rata-rata antara 5-6 jiwa dalam satu rumahtangga.

2. Struktur pendapatan rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau bahwa pendapatan utama memberi kontribusi sebesar 90,84 % dalam penyusun pendapatan rumahtangga responden, sedangkan pendapatan sampingan memberi kontribusi sebesar 9,16 % dalam penyusun pendapatan rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau.
3. Pengeluaran rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau terbagi atas dua bagian yaitu pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Pengeluaran yang terbanyak dialokasikan pada pengeluaran pangan yaitu 68,71 % sedangkan pengeluaran non pangan sebanyak 31,29 %. Besarnya pengeluaran pangan dari pada pengeluaran non pangan hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Kampung Pulau tergolong miskin dengan tingkat kesejahteraan yang masih sangat rendah.
4. Tingkat kedalaman kemiskinan penduduk Desa Kampung Pulau yang dihitung dengan analisis *Poverty Gap Index* (PGI), menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,33. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan penduduk miskin di Desa Kampung Pulau berada 33 % dibawah garis kemiskinan, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan rata-rata rumahtangga miskin kurang lebih sekitar 33 %, dan pemerintah akan lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Kampung Pulau
5. Tingkat keparahan kemiskinan penduduk Desa Kampung Pulau yang dihitung dengan analisis *Poverty Severity Index* (PSI), menghasilkan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,12. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran diantara masyarakat miskin di Desa Kampung Pulau menunjukkan ketimpangan yang kecil, yang mengindikasikan ketimpangan yang rendah diantara rumahtangga miskin di Desa Kampung Pulau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Kumpulan Jurnal Manajemen Jurnal Keuangan Jurnal Perdagangan Jurnal Ekonomi Bahan Kuliah*. Jurnal-SDM.blogspot.com. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2009*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2011*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka 2011*. Indragiri Hulu.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Provinsi Riau dalam Angka 2011*. Riau.
- Bank Dunia. 2012. *Indikator Ketimpangan Pendapatan 2012*. Ekonomi-Kelas.blogspot.com. Diakses pada tanggal 25 Maret 2012.
- Dillon, H. 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hulu. 2012. *Data Harga Kebutuhan Pokok 2012*. Indragiri Hulu.

- Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu. 2011. *Data Penerima Jamkesmas 2011*. Indragiri Hulu.
- Endang. 2009. *Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Serta Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
- Gunarto, T. 2001. *Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan di Provinsi Lampung*. Jurnal Sosial Ekonomi, Lampung.
- Herlina, Leni. 2011. *Analisis Pendapatan Petani Karet di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
- Jelita, Mustina, SL. 2010. *Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Serta Ketimpangan Pendapatan Pada Keluarga Miskin di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar*. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
- Kantor Kepala Desa Kampung Pulau Indragiri Hulu. 2012. *Data Monografi Desa Kampung Pulau 2012*. Indragiri Hulu
- Katalog BPS 3205012. 2007. *Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan 2007*. Jakarta.
- Katalog BPS 3205015. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta
- Katalog BPS 1306030. 2009. *Analisis Kemiskinan Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan 2009*. Jakarta
- Moeljantoro. 1993. *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Panca, Ramadhani Putra. 2007. *Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Petani Karet di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
- Pasalina, Roby. 2007. *Struktur Pendapatan dan Pola Pengeluaran Masyarakat Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. 2011. *Peta Rencana dan Tata Ruang*. Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sajogyo. 1990. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Rangka Industrialisasi*. Sekindo Eka Jaya, Jakarta.
- Samuelson, P.A dan William D.N. 1997. *Makro Ekonomi: Edisi ke-14*. Erlangga, Jakarta.
- Soekartawi. 1992. *Analisis Usaha Tani*. UI-Press, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto. 2001. *Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan di Provinsi Lampung*. Jurnal Sosial Ekonomi. Lampung
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar: Edisi ke-3*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Edisi ke-2*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Sumitro, Remi Sutiyastie. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syukur, E. 2000. *Perekonomian Indonesia*. UNRI Press, Pekanbaru.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, MP. 1994. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, MP. 1995. *Pengantar Ekonomi untuk Negara Sedang Berkembang, Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip Masalah Kebijakan Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Suseno T. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius, Yogyakarta.